

Pelemahan Kekuatan Rusia di Suriah dan Transisi Hegemonik Kekuasaan Bashar al-Assad

Margaretha Hadia Babur

Faculty of Economics and Social Science, International Relations Study Program
Universitas Amikom Yogyakarta
gretha@students.amikom.ac.id

Yoga Suharman

Faculty of Economics and Social Science, International Relations Study Program
Universitas Amikom Yogyakarta
yoga.shrmn@amikom.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis hubungan kausalitas antara melemahnya pengaruh Rusia di Suriah dan transisi hegemoni kekuasaan Bashar al-Assad. Penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara Uni Soviet dan Partai Ba'ath, fragmentasi oposisi, krisis kemanusiaan dan ketegangan geopolitik di Suriah. Artikel ini mengisi kesenjangan teoritis dari riset-riset terdahulu dengan menggunakan tiga konsep dari pemikiran Antonio Gramsci, yakni blok historis (*historical bloc*), transisi hegemonik (*hegemonic transition*), dan *interregnum*. Penelusuran proses (*process tracing*) digunakan sebagai cara menguraikan proses kausal dengan melihat pada urutan kejadian dan hubungan sebab akibat. Argumen artikel ini adalah bahwa blok historis Rusia-Suriyah yang terbentuk sejak era Soviet hingga pra kejatuhan Assad melemah karena tiga faktor: (1) pergeseran fokus Rusia ke dua fokus berbeda, yang melemahkan hubungan material (ekonomi-militer) dan non-material (ideologis); (2) meningkatnya tekanan oposisi domestik dari aliansi sosial (*social alliance*) anti-rezim; dan (3) tekanan internasional yang mendorong pergeseran hegemoni Assad. Dalam konteks ini, *interregnum* yang dimaknai sebagai fase ketidakpastian, berkontribusi pada transisi kekuasaan Assad dan mendorong perubahan formasi politik di Suriah.

Kata Kunci: Blok Historis, Hegemoni, *Interregnum*, Suriah, Rusia

Abstract

This article examines the causal relationship between Russia's declining influence in Syria and the hegemonic transition of Bashar Al-Assad's regime. While previous scholarship has address into the Soviet Union - Ba'ath Party relationship, opposition fragmentation, humanitarian crises, and geopolitical tensions in Syria, this study fills a gap by applying Antonio Gramsci's

thought of historical bloc, hegemonic transition, and interregnum, utilizing the process tracing method. The core argument posits that the historical bloc between Russia and Syria, established during the Soviet era and persisting until Assad's pre-fall period, deteriorated due to three primary factors: (1) Russia's diversion of focus to multiple fronts, weakening both material (economic-military) and non-material (ideological) ties; (2) escalating domestic opposition from anti-regime social alliances; and (3) international pressures prompting a shift in Assad's hegemonic power. In this context, the interregnum, characterized by uncertainty, further contributed Assad's power transition and spurred political changes in Syria.

Keywords: *Historical Bloc, Hegemony, Interregnum, Syria, Russia*

1. Pendahuluan

Hubungan Rusia-Suriah merupakan salah satu aliansi strategis paling konsisten di Timur Tengah sejak era Perang Dingin. Sejak Hafez al-Assad pada 1970, Suriah menjadi sekutu utama Uni Soviet dan kemudian Rusia. Kedua negara berbagi visi ideologis sosialisme, anti-imperialisme serta kepentingan strategis dalam membendung pengaruh Amerika Serikat (AS) di kawasan (Erkan 2023; Akgüden and Atmaca 2023; Ataman 2012). Hubungan keduanya berlanjut selama beberapa dekade, bahkan setelah Uni Soviet Runtuh. Sebagaimana dinyatakan Kreutz (2007) bahwa “*Rusia has continued to modernize and repair military hardware, and the weapons used by the Syrian army are 90 percent Soviet or Russian in origin*” (Kreutz 2007). Dukungan militer, ekonomi, dan diplomasi dari Moskow telah menjadi pilar utama keberlangsungan sosialisme dan rezim Ba’ath di Suriah (Trudolyubov and White 2024), membentuk blok historis (*historical bloc*), yakni satu perpaduan antara struktur material yang mencakup ekonomi-militer dan suprastruktur ideologis (Cox 1985).

Meski demikian, sejak invasi ke Ukraina pada Februari 2022, kapasitas Moskow untuk mempertahankan perannya di Suriah mengalami kemunduran relatif. Sumber daya militer dan finansial dialihkan untuk kepentingan geopolitik di Eropa Timur, sementara sebagian pasukan dan sistem pertahanan udara ditarik dari Suriah. Kondisi ini melemahkan dukungan material terhadap rezim Bashar al-Assad, yang sebelumnya cukup bergantung dengan patronase Rusia (Phillips 2022). Hal ini berlangsung bersamaan dengan meningkatnya tekanan dari oposisi domestik dan kekuatan ekstra regional, seperti AS dan sekutu, yang memperkuat dukungan terhadap kelompok kontra hegemoni di Suriah. Kombinasi antara pelemahan dukungan Rusia dan menguatnya oposisi mendorong terjadinya momentum krisis atau dalam perspektif Gramscian disebut sebagai *interregnum*, yakni fase transisi ketika tatanan lama melemah dan tatanan baru belum terbentuk secara mapan (Stahl 2019; Gramsci 1971).

Pada 8 Desember 2024, Bashar al-Assad meninggalkan Suriah untuk mencari suaka politik di Rusia, sebuah langkah yang menjadi titik balik dalam sejarah negara tersebut (Tempo 2024; Aulia 2024). Keputusan ini diambil setelah tekanan politik yang semakin meningkat dari berbagai pihak baik oposisi domestik maupun komunitas internasional dari AS dan Uni Eropa (Hassan 2023). Kepergian Assad juga sekaligus menandai berakhirnya perang saudara yang telah berlangsung selama 13 tahun, yang telah menyebabkan jutaan orang mengungsi dan kehancuran sebagian dari infrastruktur negara (Kabalan 2024).

Sejak peristiwa kejatuhan rezim tersebut, Partai Ba'ath yang telah berkuasa di Suriah sejak 1963 dan menjadi pilar kekuatan utama kekuasaan Assad mengumumkan penangguhan aktivitasnya hingga waktu yang belum ditentukan (ANTARA News 2024). Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan pertanyaan: bagaimana pelemahan kekuatan Rusia di Suriah berkontribusi terhadap transisi hegemonik kekuasaan Bashar al-Assad? Artikel ini bertujuan untuk menguraikan hubungan kausalitas antara pelemahan dukungan Rusia, melemahnya legitimasi Assad, dan dinamika politik domestik-internasional dengan metode penelusuran proses (*process tracing*) dan dikaji melalui perspektif Gramscian.

2. Tinjauan Literatur

Sejumlah riset terdahulu telah mengungkap dinamika politik dalam konflik Suriah dengan fokus pada keterlibatan negara-negara besar. Akgüden dan Atmaca (2023) dalam artikel berjudul “*The Roots of the Soviet Syrian Alliance: A Neo-Gramscian Perspective*” menelusuri relasi hegemonik antara Uni Soviet dan rezim Ba'ath (1940-1980), yang dibangun melalui kesepakatan ideologis, institusional, dan material. Uni Soviet memberikan dukungan militer, ekonomi dan politik kepada Suriah sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Suriah mengadopsi sosialisme dan anti-imperialisme sebagai basis legitimasi rezim (Akgüden and Atmaca 2023).

Selanjutnya, Lund (2019) dalam artikel berjudul “*From Cold War to Civil War: 75 Years of Russian-Syrian Relations*” melacak evolusi hubungan bilateral Rusia (sebelumnya Uni Soviet) dan Suriah sejak (1944-2019), menyoroti peran Rusia sebagai patron militer utama. Meskipun sempat melemah pasca 1991 tetapi kembali menguat pada 2000-an seiring ketegangan antara Rusia dan Barat. Artikel berikutnya ditulis oleh Phoenna et.al (2020) yang berjudul “Peran Nasional Rusia Terhadap Konflik Suriah (2015-2020)” menguraikan konsep *National Role Conceptions* dari Kalevi J. Holsti, untuk menjelaskan Rusia sebagai sekutu terpercaya (*faithful ally*) melalui diplomasi, veto di PBB dan operasi militer.

Artikel Pipes (2017) berjudul “*Syria: The Cuba of the Middle East*” menggarisbawahi posisi Suriah sebagai proksi Soviet dalam melawan AS dengan dukungan terhadap kelompok militan dan anti-Amerika di Lebanon. Sementara Mogannam (2017) dalam “*Syria’s anti-imperialist mask: unveiling contradictions of the left through anti-capitalist thought*” mengkritik paradoks neoliberalisme Suriah di balik retorika anti-kapitalis.

Beberapa penelitian terdahulu berfokus pada hubungan antara Uni Soviet dan Suriah dalam mempertahankan rezim Assad melalui dukungan ideologis, militer dan diplomasi serta kepentingan geopolitik. Berbeda dengan sejumlah penelitian terdahulu, artikel ini mengisi celah riset terdahulu dengan meminjam perspektif Gramscian untuk menganalisis hubungan kausalitas antara sejumlah aspek, yakni pelemahan pengaruh Rusia dan transisi hegemonik kekuasaan rezim Bashar al Assad di Suriah berdasarkan tiga konsep, yakni, blok historis (*historical bloc*), transisi hegemonik (*hegemonic transition*) dan *interregnum*.

3. Kerangka Analisis

Kajian ini memanfaatkan ide-ide Gramscian untuk menelusuri pergeseran kekuasaan yang berlangsung di Suriah, diantaranya blok historis (*historical bloc*), transisi hegemonik (*hegemonic transition*) dan *interregnum*. Pertama, blok historis (*historical bloc*) didefinisikan sebagai kesatuan dialektis antara struktur material (ekonomi dan politik) dan suprastruktur yang mencakup ideologis dan budaya dalam suatu masyarakat (Hoare and Smith 1971). Konsep ini menegaskan bahwa stabilitas hegemonik tercapai ketika kelas sosial berhasil mempertahankan dominasinya. Dalam konteks ini, negara dalam pengertian Gramscian yang luas dipandang sebagai entitas yang memelihara blok historis melalui penyebaran budaya guna memperkuat legitimasi dan kontrol politiknya (Cox 1985, 168).

Blok historis juga dipahami sebagai koalisi kekuatan sosial yang menciptakan dan menopang dominasi kelas tertentu. Pada tingkat global, konsep ini diperluas oleh Robert W. Cox (1985) untuk menganalisis bagaimana kekuatan hegemonik seperti negara-negara kapitalis maju dan lembaga internasional mempertahankan supremasi mereka melalui interaksi antara kekuatan ekonomi, hegemoni ideologis dan institusi politik (Cox 1985). Namun blok historis bisa mengalami krisis. Hal ini kerap dipicu oleh ketimpangan antara elemen-elemen pembentuknya, terutama ketika terjadi disrupsi dalam kepemimpinan ideologis atau transformasi tatanan politik (Gills 1993).

Kedua, proses pergeseran kekuatan dapat ditelaah melalui konsep transisi hegemonik (*hegemonic transition*), dimana transisi kekuasaan dipandang sebagai fenomena dinamis, yang terkait erat dengan transformasi struktur sosial domestik suatu negara (Gills 1993). Menurut

Gramsci, negara adalah medan konflik sosial yang menempatkan perjuangan hegemoni diantara kelas-kelas sosial (Gramsci, 1971: 176 dikutip Gills 1993). Untuk mencapai hegemoni, tiga prasyarat utama harus terpenuhi: (1) kesadaran kritis aktor terhadap posisinya dalam struktur sosial, (2) pembentukan aliansi strategis dengan kelompok subordinat untuk memperluas basis legitimasi, dan (3) dominasi ideologis melalui internalisasi wacana dan nilai-nilai dominan (Adamson 1980).

Analisis Gramscian mengenai perebutan hegemoni dibedakan antara dominasi yang mengandalkan instrumen koersif melalui militer dan represi politik dengan hegemoni yang dicirikan oleh penerimaan sukarela melalui konsensus (*consent*). Mekanisme transformasi hegemoni ini selanjutnya dikonseptualisasikan melalui dua paradigma strategis: (1) *war of movement* yang dimanifestasikan oleh perubahan revolusioner melalui konfrontasi langsung dan (2) *war of position* yang mengedepankan perubahan bertahap melalui pergeseran ideologis dan sosial (Gramsci, 1971 dikutip Gills 1993).

Ketiga, dinamika transisi hegemonik kerap melibatkan fase krisis yang disebut Gramsci sebagai “*interregnum*”, yaitu periode dimana tatanan lama mengalami kemunduran sementara tatanan baru belum terinstitusionalisasi sepenuhnya: “*the old is dying and the new cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms appear*” (Hoare and Smith 1971). Dalam konteks transisi kekuasaan di Suriah, fase ini dicirikan oleh gejala-gejala patologis (*morbid symptoms*) seperti ekstremisme, krisis legitimasi, dan kebingungan ideologis (Stahl 2019). Situasi ini menggambarkan bagaimana ketidakmampuan suatu kekuatan hegemonik dalam hal ini Rusia dan rezim hegemonik Suriah untuk mempertahankan blok historis yang telah terbentuk sebelumnya, yang pada gilirannya menghasilkan ketidakpastian politik dan membuka ruang bagi aktor-aktor alternatif untuk membentuk kekuatan kontra-hegemonik.

Oleh karena itu, konsep-konsep Gramsci seperti blok historis, *interregnum* dan transisi hegemonik mempunyai kontribusi penting untuk menjawab pertanyaan dalam artikel ini, yakni bagaimana pelemahan kekuatan Rusia di Suriah berkontribusi terhadap transisi hegemonik rezim Bashar al-Assad? Selama beberapa dekade, blok historis antara Rusia dan Suriah dibangun melalui tiga pilar utama: (1) dukungan material, (2) legitimasi politik di forum internasional dan (3) konsolidasi ideologis yang mengandung narasi anti-barat dan anti-imperialisme.

Berangkat dari gagasan tersebut, situasi yang berkembang di Suriah menggambarkan dinamika transisi kekuatan. Pertama, pelemahan dukungan Rusia telah menciptakan krisis bagi stabilitas hegemonik rezim Bashar al-Assad, yang selama ini bergantung dengan patronase Rusia. Kedua, fragmentasi kekuasaan yang ditandai dengan kemunculan aktor-aktor sosial,

baik oposisi domestik maupun kekuatan ekstra regional yang berusaha memperebutkan posisi hegemonik. Kondisi krisis ini mempercepat proses keretakan blok historis, yang sebelumnya menjadi pilar kekuasaan Bashar al-Assad. Berkurangnya dukungan Rusia bagi Assad menciptakan krisis legitimasi, sementara para pendukung Suriah seperti Iran dan kelompok loyalisnya belum cukup kuat untuk memberi dukungan dan karena itu, transisi kekuatan hegemonik menjadi semakin tidak terhindarkan.

4. Metode

Artikel ini memanfaatkan metode *process tracing* (PT) sebagai bagian dari penelitian kualitatif dalam penelitian sosial dan politik. PT digunakan untuk menelusuri hubungan kausalitas dalam suatu peristiwa atau fenomena dengan menyoroti urutan peristiwa (Beach 2023; Collier 2011; Smith 2019). Dalam konteks pelemahan Rusia di Suriah terhadap kejatuhan rezim Assad, PT digunakan untuk menelusuri bagaimana faktor-faktor tertentu seperti menguatnya gerakan kontra-hegemoni berkontribusi terhadap transisi kekuatan Bashar al-Assad.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran studi dokumen yang mencakup jurnal nasional dan internasional, buku serta artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Studi dokumen dilakukan tanpa melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang diperoleh dari sumber sekunder. Interpretasi digunakan untuk menganalisis data dan dokumen yang dikumpulkan untuk memahami bagaimana pelemahan Rusia berpengaruh terhadap kejatuhan rezim Assad.

Hal penting lain yang perlu diuraikan pada bagian metode ini adalah batasan penelitian. Dalam pemikiran Antonio Gramsci, sejarah merupakan proses dialektis yang membentuk hubungan antara struktur sosial, ideologi, dan kekuasaan. Gramsci menjelaskan konsep *historicity of the philosophy of praxis* yang menekankan bahwa sejarah merupakan suatu proses yang dialektis yang terus berkembang. Perkembangan sejarah merupakan suatu kesatuan temporal, dimana kondisi masa kini tidak dapat dipisahkan dari warisan masa lalu, karena unsur-unsur esensial dari peristiwa terdahulu tetap hidup dan berkontribusi dalam membentuk realitas saat ini (Stanford Encyclopedia of Philosophy 2023).

Pandangan ini menegaskan bahwa sejarah menempatkan interaksi kompleks antara struktur sosial, ideologi dan kekuasaan yang secara dinamis membentuk arah perubahan sosial (Hoare and Smith 1971). Dialektika historis Gramsci menekankan bahwa perubahan sosial terjadi dalam jangka panjang, di mana berbagai kelompok sosial berusaha membangun

hegemoni baru di dalam struktur politik yang ada. Oleh karena itu, meski penelitian ini berfokus pada transisi yang berlangsung pada akhir tahun 2024. Rentang sejarah yang terjadi pada periode sebelumnya tetap akan dirujuk untuk mengurai sekuensi kausal pola transisi terkait bagaimana ideologi mengakar, berkembang, melemah, dan mengalami rekonstruksi sesuai dengan kondisi material yang ada saat ini.

5. Analisis dan Pembahasan

5.1 *Pembentukan Blok Historis Era Soviet dan Rusia di Suriah*

Pembentukan blok historis antara Rusia dan Suriah tidak terlepas dari dinamika geopolitik yang berlangsung sejak era Perang Dingin. Timur Tengah menjadi medan pertarungan ideologis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (Reich and Gotowicki 1994). Dalam konteks ini, Uni Soviet memberikan dukungan kepada kelompok negara yang dianggap tertindas oleh kapitalisme barat, termasuk Suriah dengan tujuan membangun pemerintahan yang berlandaskan sosialisme (Bartz 2016). Kepentingan bersama untuk melawan imperialisme Barat memperkuat hubungan ideologis antara keduanya, sehingga Suriah menjadi basis kekuatan ideologis Soviet di kawasan Timur Tengah (Al-Basre 2023).

Fase awal hubungan ini dimulai dengan perjanjian antara Uni Soviet dan Suriah pada tahun 1946 (Aghayev and Katman 2012). Perjanjian ini mencakup pemberian dukungan militer dan diplomatik yang diberikan sebelum Suriah merdeka dari Prancis. Selanjutnya, setelah krisis Suez 1956, hubungan Suriah-Soviet semakin intensif. Hal ini terbukti dengan penandatanganan perjanjian bantuan ekonomi dan teknis pada tahun 1957 serta peningkatan kerja sama militer antara kedua negara (Şen 2020).

Uni Soviet berkomitmen untuk mendukung pemerintah Suriah dalam mencapai kemerdekaan penuh, termasuk mendesak evakuasi pasukan Prancis dan Inggris, mengirim guru untuk membangun sistem pendidikan yang bebas pengaruh Barat, menandatangani perjanjian ekonomi, perdagangan, dan navigasi, serta mengirim personel militer untuk membantu pembangunan angkatan bersenjata. Sebagai imbalannya, Suriah memberikan status “*most favoured nation*” kepada Uni Soviet (Ginat 2000). Bantuan Soviet difokuskan pada transformasi ekonomi negara-negara mitra melalui investasi di sektor pendidikan, pelatihan teknis, serta pengembangan industri, dengan tujuan menanamkan prinsip-prinsip sosialisme (Dawisha 1979; Barghoorn 1958).

Memasuki dekade 1950-an, hubungan bilateral semakin menguat seiring gelombang revolusi progresif di Timur Tengah, dimana Uni Soviet mengisi kekosongan kekuatan internasional sejak Inggris dan Amerika Serikat menolak mendukung gerakan revolusioner

Arab (Shad et al. 1995; Şen 2020). Ketidakstabilan politik Suriah pasca kemerdekaan ditandai serangkaian kudeta militer 1949-1953, menciptakan ruang bagi perluasan pengaruh Soviet melalui dukungan militer berupa jet tempur MiG-15 dan MiG-17 serta penempatan instruktur militer di Suriah (Even 2016). Kudeta militer 1954 yang membawa partai Ba'ath ke panggung politik semakin memperkuat ikatan ideologis dengan Soviet (Aghayev and Katman 2012).

Periode ini diikuti oleh perluasan perjanjian kerja sama pada sektor pendidikan dan kebudayaan 1956-1962 (Aghayev and Katman 2012). Momentum semakin menguat sejak pembentukan Republik Arab Bersatu tahun 1958, yang semakin mempererat hubungan Suriah dengan blok Soviet (Dostal 2015). Rusia melanjutkan strateginya dengan memperkuat pengaruh budaya dan ideologinya di Suriah melalui pendidikan serta diplomasi publik. Bahasa Rusia mulai diajarkan di sekolah-sekolah Suriah, dengan jumlah siswa yang meningkat dari 24.000 pada 2020 menjadi 39.500 pada 2025 (Yassin 2024). Program ini menunjukkan bahwa Rusia berupaya memenangkan posisi dan membentuk generasi baru yang lebih dekat dengan budaya dan nilai-nilai Rusia. Adopsi doktrin sosialisme memperdalam kesamaan pandangan anti-imperialis yang berakar dari pengalaman perjuangan kemerdekaan Suriah (Torrey 1969; Ginat 2000). Persamaan sikap anti barat ini menciptakan konvergensi ideologis yang membentuk hegemoni Soviet di Suriah (Akgüden 2020).

Hubungan antara Uni Soviet dan Suriah selama Perang Dingin mencerminkan dinamika geopolitik yang kuat, didasarkan pada neksus antara kepentingan strategis, ideologi, budaya, dan kebutuhan militer-ekonomi. Hubungan historis ini bersifat timbal balik dan saling menguntungkan. Suriah memperoleh pasokan senjata strategis berkelanjutan dari Uni Soviet untuk menghadapi Israel dalam konflik Arab-Israel, sementara Uni Soviet memperoleh pijakan di Suriah sebagai akses ke Timur Tengah dan Afrika Utara, memungkinkan Moskow menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut.

Pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Suriah mengalami ketidakpastian politik dan ekonomi akibat hilangnya dukungan dari blok Timur. Namun rezim otoriter Hafiz al-Assad tetap bertahan dengan mengandalkan kontrol ketat atas militer dan Partai Ba'ath. Ketika Bashar al-Assad naik ke puncak kekuasaan pada tahun 2000, hubungan dengan Rusia sebagai penerus Uni Soviet kembali menguat, terutama melalui dukungan militer dan politik, seperti pasokan senjata dan veto di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi rezim Suriah dari intervensi Barat. Meskipun Uni Soviet telah bubar, Rusia bersama Cina dan Iran membentuk semacam "blok baru" yang mendukung otoritarianisme Suriah, mencerminkan kesinambungan dinamika aliansi global ala Perang Dingin. Kejatuhan Uni Soviet tidak mengakhiri blok politik di Suriah, melainkan mentransformasikannya melalui kebangkitan kembali pengaruh Rusia dan aliansi

strategis yang menjaga kelangsungan rezim Assad hingga konflik Suriah pasca-Arab Spring (Ghafur 2017).

Pada 2004-2005, hubungan bilateral memasuki fase lebih konkret menyusul tekanan Barat terhadap Suriah. Krisis diplomatik mencuat ketika Suriah dituduh terlibat dalam pembunuhan PM Lebanon Rafik al-Hariri, memicu resolusi PBB berisi ancaman sanksi. Rusia menggunakan hak vetonya untuk melindungi Suriah, sekaligus menegaskan penolakannya terhadap intervensi Barat. Momentum penting terjadi pada Januari 2005 ketika Presiden Bashar al-Assad mengunjungi Moskow untuk pertama kalinya kunjungan yang menghasilkan kesepakatan penghapusan 73% utang luar negeri Suriah senilai \$13.4 miliar (Blank 2005). Langkah ini menyelamatkan Suriah dari isolasi dan sanksi serta menjadi fondasi bagi intervensi militer Rusia di Suriah satu dekade kemudian (Lund 2019). Intervensi militer Rusia di Suriah pada tahun 2015 menjadi titik balik yang melanjutkan blok historis sejak perang dingin (Phoenna, Purnama, and Dermawan 2023; Trujillo 2025), ditandai dengan bantuan material dan pelatihan kader dari Moskow (Króowska 2011).

Strategi Rusia berfokus pada stabilisasi Rezim Assad sambil mencegah pengambilalihan kekuasaan oleh oposisi atau kelompok jihadis (Oligie 2019). Hal ini mencerminkan penolakan Rusia terhadap perubahan besar dan memanfaatkan aliansinya dengan rezim-rezim otoriter sebagai upaya menahan pengaruh Barat serta mencegah penyebaran ideologi yang berpotensi mengancam *status quo* (Ginor 2003). Kepemimpinan Bashar al-Assad yang bersifat otoriter serta dominasi Partai Ba'ath memperkuat posisi Rusia di Suriah (Yonker and Solomon 2021). Pada saat yang sama, Rusia secara konsisten memblokir resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang berpotensi mengancam kekuasaan Bashar al-Assad (Borshchevskaya 2020).

Blok historis dalam konteks hubungan Rusia – Suriah direfleksikan dalam bentuk kombinasi antara kepentingan strategis, ideologi, dan dinamika geopolitik. Soviet berperan dalam mendukung Partai Ba'ath, yang mengusung sosialisme dan pan-Arabisme. Sejak era Perang Dingin, Uni Soviet membangun hubungan erat dengan Suriah melalui penyebaran nilai-nilai sosialisme dan anti-imperialisme. Aliansi ini menjadi bagian dari blok historis yang lebih luas, di mana Uni Soviet dan Suriah membentuk hubungan saling menguntungkan dalam menghadapi dominasi geopolitik Barat di Timur Tengah. Rusia sebagai penerusnya tetap mempertahankan hubungan ini dengan melanjutkan dukungan terhadap rezim Bashar al-Assad, yang mencerminkan kesinambungan proyek hegemonik yang telah dibangun sebelumnya. Dari konsepsi blok historis, keterlibatan Rusia di Suriah sejak 2015 merefleksikan strategi jangka panjang yang berakar pada hubungan ideologis dan kepentingan geopolitik yang lebih luas.

5.2 *Interregnum: Momentum Krisis dan Transisi Hegemonik*

Blok historis yang terbentuk melalui dukungan militer, ekonomi dan ideologis sejak era Soviet hingga Rusia terhadap Suriah mulai mengalami perubahan pada dekade awal 2020-an. Perubahan ini mencapai puncaknya pada Februari 2022, ketika invasi Rusia ke Ukraina menjadi titik balik hubungan kedua negara (Smagin 2023). Perubahan ini secara signifikan menggeser perhatian Rusia sebagai pendukung utama rezim Bashar al-Assad. Rusia menyadari rezim Assad tidak memiliki legitimasi kuat dan hanya membebani keuangan mereka. Perubahan ini merupakan hasil gabungan kegagalan internal Suriah dan pergeseran prioritas Rusia (Giustozzi 2025). Tekanan internasional, terutama dari AS, turut memengaruhi situasi di Suriah. Sanksi ekonomi dari AS dan sekutu yang memperburuk kondisi ekonomi, beberapa di antaranya ditujukan pada sektor-sektor krusial, seperti energi, perbankan, dan telekomunikasi, serta institusi utama, termasuk bank sentral (The Economist 2025).

Pada sisi lain, pihak Barat memperkuat oposisi melalui berbagai saluran. Sejak tahun 2011, lebih dari \$1,3 miliar bantuan stabilisasi telah diberikan oleh AS untuk wilayah Suriah di luar kendali rezim. Bantuan ini dipandang sebagai elemen penting dalam misi “*Operation Inherent Resolve*” (OIR) karena mengurangi ketegangan sosial dan ekonomi yang sebelumnya dimanfaatkan oleh ISIS meningkatkan kapasitas otoritas lokal, serta mendukung masyarakat sipil (Humud 2022).

Keterlibatan aktif Amerika Serikat dan aliansi Barat dalam dinamika konflik Suriah berdampak pada keseimbangan kekuatan geopolitik dan dinamika domestik. Pergeseran hegemoni seiring dengan melemahnya pengaruh Rusia telah menciptakan ketidakpastian yang lebih luas, memengaruhi hubungan antara negara-negara kawasan, serta menimbulkan konsekuensi terhadap stabilitas politik Suriah. Momentum yang ditandai oleh pelemahan Rusia di Suriah, memperkuat gerakan kontra hegemoni dari aliansi sosial (*social alliances*) yang menantang legitimasi kekuasaan Bashar al-Assad. Momentum ini mendorong keterlibatan lebih lanjut dari aktor eksternal, terutama Amerika Serikat sebagai penopang kekuatan pihak oposisi yang terus memperkuat dukungannya (National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces 2023; Mudore and Safitri 2019). Kelompok oposisi, terutama *The Army of Conquest*, mencakup berbagai kelompok berbasis Islam, seperti *Ahrar al-Shaman*, *Faylaq al-Sham* dan *Free Syrian Army* (FSA) berhasil memanfaatkan dukungan eksternal ini (Mudore and Safitri 2019).

Pada 8 Desember 2024, kota Damaskus berhasil dikuasai oleh kelompok pemberontak bersenjata, yang menyebabkan Presiden Bashar al-Assad yang telah lama berkuasa harus meninggalkan negara tersebut. Kehilangan kendali atas Damaskus pada Desember 2024

menjadi simbol runtuhnya otoritarianisme yang selama ini didukung oleh Rusia di kawasan tersebut. Peristiwa ini terjadi setelah perang saudara yang berlangsung selama 13 tahun, yang secara *de facto* menandai akhir dari dominasi rezim Assad (Alshamary et al. 2024). Kondisi ini semakin memperburuk situasi politik dan keamanan di Suriah serta meningkatkan ketidakpastian mengenai kemampuan Rusia dalam mempertahankan pengaruhnya di wilayah tersebut. Pasca-kejatuhan Bashar al-Assad, Suriah memasuki fase *interregnum* yang penuh ketidakpastian. Faksi Kurdi yang didukung AS dan kelompok Sunni yang didukung Turki saling bersaing mengisi kekosongan kekuasaan. Fase transisi ini menggambarkan prinsip Cox bahwa perubahan hegemoni melibatkan persaingan panjang sebelum mencapai keseimbangan baru (Cox 1983) dan mencerminkan runtuhnya basis suprastruktur yang terbentuk sejak era Soviet.

Pelemahan Rusia di Suriah mencerminkan pelemahan dukungan material seperti finansial dan militer serta keretakan blok historis yang menopang rezim Bashar al-Assad. Rusia, yang selama ini berperan sebagai kekuatan hegemonik dengan menyediakan sumber daya dan narasi anti-Barat, semakin kehilangan kapasitasnya untuk mempertahankan dominasi di Suriah sejak invasi ke Ukraina pada 2022. Ketika negara patron mengalami pelemahan, apparatus hegemonik yang dibangun mulai runtuh, menciptakan peluang bagi oposisi domestik dan aktor eksternal untuk mendorong transformasi sosial dan politik.

Kejatuhan Assad pada gilirannya bukan hanya hasil dari perlawanan oposisi, tetapi juga konsekuensi dari kegagalan Rusia dalam mempertahankan proyek hegemoniknya di Suriah. Dengan berkurangnya keterlibatan Rusia dan ketidakmampuan aktor lain untuk mengisi kekosongan kekuasaan, Suriah memasuki fase ketidakpastian politik yang mengarah pada fragmentasi kekuasaan atau bahkan persaingan hegemonik baru. Hal ini menegaskan bahwa pelemahan kekuatan Rusia merupakan elemen kunci dalam transisi hegemonik kekuasaan Bashar Al Assad di Suriah. Dalam konteks demikian, muncul skenario yang mungkin terjadi di Suriah.

Pertama, fragmentasi semakin tajam dan menyebabkan kebuntuan politik. Jika kelompok-kelompok utama gagal mencapai kesepakatan, maka Suriah dapat mengalami situasi seperti Libya pasca 2011, di mana negara terpecah tanpa pemerintahan pusat yang kuat. Dalam kondisi ini, konflik berkepanjangan akan melemahkan legitimasi kelompok-kelompok yang bersaing, berpotensi membentuk formasi negara gagal (*failed state*). Kedua, fragmentasi dapat berkembang menjadi keseimbangan kekuasaan baru. Jika kelompok seperti Kurdi dan Arab Sunni menunjukkan fleksibilitas politik dan bernegosiasi untuk membentuk pemerintahan sementara yang inklusif, maka Suriah berpotensi bergerak menuju stabilitas yang lebih besar.

Hal ini mencirikan bahwa dunia tanpa hegemoni dominan menuntut proses kompromi yang berkelanjutan. Ketiga, fragmentasi justru dapat mempercepat kemunculan hegemoni baru. Dalam skenario ini, salah satu aktor misalnya AS maupun Turki berhasil mengkonsolidasikan pengaruhnya secara lebih dominan, menciptakan tatanan baru yang lebih terkonsolidasi di dalam negeri Suriah.

Momentum ketidakpastian yang terjadi berpotensi membentuk tatanan politik berbeda di Suriah, baik dalam bentuk sistem yang lebih demokratis maupun otoriter. Namun, hingga saat ini, arah perubahan tersebut masih belum dapat dipastikan mengingat kondisi politik dan keamanan yang masih tidak stabil. Pelemahan pengaruh Rusia di Suriah melampaui kemunduran dalam aspek material dan mencerminkan kegagalan dalam mempertahankan basis suprastruktur proyek hegemoniknya. Dalam konteks transisi kekuasaan, melemahnya dominasi Rusia berkontribusi terhadap runtuhnya hegemoni Bashar al-Assad dan membuka peluang bagi oposisi untuk memperebutkan posisi hegemonik (*war of position*). Oleh karena itu, fragmentasi yang terbentuk di Suriah bisa berkembang ke arah yang belum dapat diprediksi, tergantung pada sejauh mana aktor-aktor baru mampu membangun konsensus.

5.3 Delegitimasi Kekuasaan Bashar al-Assad

Delegitimasi kekuasaan Bashar al-Assad dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari melemahnya kekuatan dan pengaruh Rusia di Suriah serta meningkatnya tekanan dari kelompok-kelompok kontra-hegemoni yang menentang rezim tersebut. Legitimasi eksternal yang menopang pemerintahan Assad mengalami pelemahan. Sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Rusia telah menyebabkan berkurangnya kapasitas negara tersebut dalam mempertahankan keterlibatannya di Suriah. Bantuan militer yang sebelumnya disuplai secara konsisten mulai mengalami pengurangan, sehingga pasukan pemerintah Suriah mengalami kesulitan dalam menghadapi serangan dari kelompok oposisi dan faksi bersenjata lainnya. Selain itu, diplomasi Rusia di tingkat internasional mengalami kemunduran, yang mengakibatkan berkurangnya dukungan terhadap pemerintahan Bashar al-Assad dalam forum global.

Selain faktor eksternal, berbagai dinamika internal turut mempercepat delegitimasi Bashar al-Assad. Ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat Suriah akibat krisis ekonomi dan kelangkaan sumber daya telah menyebabkan meningkatnya sentimen anti-pemerintah. Ketidakmampuan rezim dalam mengatasi permasalahan ekonomi serta ketergantungan yang berlebihan terhadap aktor eksternal telah memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintahan Bashar al-Assad. Fragmentasi dalam institusi negara dan

masyarakat sipil semakin mempercepat proses ini. Konflik internal yang terjadi di dalam pemerintahan dan angkatan bersenjata telah melemahkan posisi Assad di tengah tekanan dari oposisi, kelompok pemberontak dan tekanan internasional.

Pemerintahan Partai Ba'ath, yang menjadi fondasi kekuasaan Assad, berakhir setelah 61 tahun berada dalam kendali politik Suriah. Masa pemerintahan ini juga mencakup 53 tahun dominasi keluarga Assad yang diwarnai oleh berbagai konflik (Anadolu Ajansı 2024). Kehadiran Rusia di Suriah telah mendapatkan legitimasi melalui permintaan resmi rezim Assad untuk melakukan intervensi. Namun, seiring dengan kemunduran relatif Rusia, legitimasi Bashar al-Assad tersebut turut melemah. Hal ini berkaitan erat dengan fenomena yang lebih luas, yaitu krisis otoritas yang terjadi ketika kelas penguasa kehilangan legitimasi dan persetujuan dari masyarakat (Hoare and Smith 1971).

Kekalahan Assad juga menandai kekalahan strategis bagi Rusia, yang selama ini berperan sebagai pendukung utama rezim tersebut (Alshamary et al. 2024). Presiden Joe Biden menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan momen bersejarah bagi rakyat Suriah. Selain itu, ia menegaskan bahwa “strategi kami telah menggeser keseimbangan kekuatan di Timur Tengah” (Gowayed et al. 2024). Lengsernya Bashar al-Assad turut menjadi pukulan bagi Rusia, yang sebelumnya menganggap intervensinya pada 2015 sebagai kemenangan strategis atas Barat karena berhasil mempertahankan rezim tersebut. Delegitimasi kekuasaan Bashar al-Assad pada gilirannya memperbesar peluang bagi lahirnya kekuatan-kekuatan alternatif dan memberikan keuntungan strategis bagi Amerika Serikat (Outzen 2025).

6. Kesimpulan

Pelemahan kekuatan Rusia di Suriah berkontribusi terhadap transisi hegemonik kekuasaan Bashar al-Assad terjadi melalui fase *interregnum* dan krisis legitimasi. Ketergantungan rezim Assad pada Rusia dalam aspek militer, ekonomi, dan suprastruktur telah menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari satu dekade perang saudara. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, fokus dan sumber daya Moskow beralih, menyebabkan berkurangnya keterlibatan Rusia di Suriah. Hal ini memicu serangkaian krisis yang mempercepat kejatuhan Assad. Sanksi internasional juga membatasi opsi alternatif bagi rezim Assad untuk mencari dukungan dari negara lain. Akibatnya, ketidakstabilan ekonomi memperdalam ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Assad.

Dalam konteks sosial-politik, berkurangnya hegemoni Rusia turut melemahkan otoritarianisme yang selama ini menopang stabilitas rezim Assad, sehingga memicu krisis legitimasi yang semakin dalam di tengah meningkatnya represi dan pelanggaran hak asasi

manusia. Ketidakmampuan rezim untuk mengelola krisis internal tanpa dukungan Rusia akhirnya memberikan momentum bagi kelompok oposisi untuk memperluas pengaruhnya dan menantang dominasi Assad. Dengan hilangnya pijakan strategis dan dukungan eksternal yang melemah, delegitimasi yang selama bertahun-tahun mengguncang Suriah mencapai titik puncaknya pada Desember 2024, ketika rezim Assad runtuh setelah 54 tahun berkuasa, mengakhiri dominasi Partai Ba'ath yang menandai pergeseran besar dalam dinamika politik negara dan kawasan. Hal ini memberikan peluang bagi kelompok oposisi untuk merebut kembali kendali atas beberapa wilayah, serta meningkatkan tekanan terhadap Bashar al-Assad.

Secara ideologis, rezim Ba'ath yang selama ini mendapat dukungan penuh dari Rusia mulai kehilangan pijakan. Melemahnya kekuatan Rusia menyebabkan fragmentasi dalam struktur kekuasaan di Suriah dan mempertajam fragmentasi antar faksi politik yang tidak lagi sepenuhnya selaras dengan kepentingan Moskow. Krisis legitimasi Assad semakin diperparah oleh ketidakmampuannya menawarkan stabilitas politik dan ekonomi, sehingga banyak generasi muda memilih untuk mengungsi atau bergabung dengan oposisi. Hal ini mempercepat proses transisi hegemonik rezim Bashar al-Assad setelah lebih dari lima dekade berkuasa. Keputusan Partai Ba'ath untuk menangguk aktivitasnya secara tidak terbatas menandai akhir dari hegemoni politik yang telah berlangsung sejak 1963 dan menggeser formasi negara.

Penelitian ini membuka peluang eksplorasi lebih lanjut mengenai dinamika transisi kekuasaan di Suriah pasca runtuhnya rezim Assad, dengan menyoroti aktor-aktor politik baru dan peran komunitas internasional dalam membentuk pemerintahan baru. Selain itu, studi mendatang dapat meneliti pelemahan hegemoni Rusia di Suriah dan dampaknya terhadap keseimbangan geopolitik regional, terutama dalam hubungannya dengan Iran, Turki, dan Amerika Serikat. Krisis legitimasi rezim otoriter seperti Assad juga dapat dibandingkan dengan kasus serupa di negara lain, terutama dalam konteks patronase dengan kekuatan eksternal. Selain itu, mengingat ketidakpastian politik Suriah, studi mengenai penajaman fragmentasi politik, permusuhan atau rekonstruksi ulang negara pasca otoritarian di Suriah menjadi sangat relevan untuk ditelusuri lebih lanjut.

Referensi

- Aghayev, Elvin, and Filiz Katman. 2012. "Historical Background and the Present State of the Russian-Syrian Relations." *European Researcher* 35.
- Akgüden, Muhterem. 2020. "The 2015 Russian Military Intervention in Syria: A Neo-Gramscian Hegemony Approach." Hacettepe University Graduate School of Social Sciences.
- Akgüden, Muhterem, and Ayşe Ömür Atmaca. 2023. "The Roots of the Soviet-Syrian Alliance:

- A Neo-Gramscian Perspective.” *İzmir İktisat Dergisi* 38 (4): 1176–93. <https://doi.org/10.24988/ije.1163636>.
- Al-Basre, Mustafa Kanaan NORI. 2023. “The Russian Role in the Middle East (Syria) 2013-202.” Sakarya University.
- Alshamary, Marsin, Aslı Aydıntaşbaş, Vanda Felbab-Brown, Jeffrey Feltman, Sharan Grewal, Steven Heydemann, Mara Karlin, et al. 2024. “The Assad Regime Falls. What Happens Now?” Brookings. Routledge. December 9, 2024. <https://doi.org/10.1080/13642987.2024.2334789>.
- Anadolu Ajansı. 2024. “Rezim Baath Suriah Yang Berkuasa Selama 61 Tahun Tumbang.” Anadolu Ajansı. December 16, 2024. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/rezim-baath-suriah-yang-berkuasa-selama-61-tahun-tumbang-pada-8-desember/3418397#>.
- ANTARA News. 2024. “Rezim Baath Suriah Yang Telah Berkuasa Selama 61 Tahun Tumbang.” ANTARA News. December 8, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4518961/rezim-baath-suriah-yang-telah-berkuasa-selama-61-tahun-tumbang>.
- Ataman, Muhittin. 2012. “Suriye’de İktidar Mucadelesi: Baas Rejimi, Toplumsal Talepler Ve Uluslararası Toplum,” 1–58.
- Aulia, Luki. 2024. “Detik-Detik Terakhir Assad Di Suriah Dan Kisah Pelariannya Ke Rusia.” Kompas. December 14, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/detik-detik-terakhir-assad-di-suriah-dan-pelariannya-ke-rusia>.
- Barghoorn, Frederick C. 1958. “Soviet Cultural Diplomacy since Stalin.” *Russian Review* 17 (1): 41–55. <http://www.jstor.org/stable/125724>.
- Bartz, Luke. 2016. “Russian-Syrian Relations: Past and Present.” *The Journal of Global Affairs* 6 (6). <https://shareok.org/handle/11244.46/79>.
- Beach, Derek. 2023. “Process Tracing Methods and International Studies.” *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.724>.
- Blank, Stephen. 2005. “Bashar Assad Comes to Moscow, Seeking Gifts.” *Eurasia Daily Monitor* 2 (18). https://jamestown.org/program/bashar-assad-comes-to-moscow-seeking-gifts/?utm_source=chatgpt.com.
- Borshchevskaya, Anna. 2020. “The Russian Way of War in Syria: Threat Perception and Approaches to Counterterrorism.” USA: The Washington Institute. <https://www.fpri.org/article/2020/09/about-the-book-russia-war-syria/>.
- Collier, David. 2011. “Understanding Process Tracing.” *PS - Political Science and Politics* 44 (4): 823–30. <https://doi.org/10.1017/S1049096511001429>.
- Cox, Robert W. 1983. “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method.” *Millennium - Journal of International Studies* 12 (2): 162–75. <https://doi.org/10.1177/03058298830120020701>.
- . 1985. “Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory.” *Millennium: Journal of International Studies* 10 (2): 126–55. <https://doi.org/10.1177/03058298810100020501>.
- Dawisha, Karen. 1979. “The Soviet Union and the Middle East: Strategy at the Crossroads?” *The World Today* 35 (3): 91–100. <https://doi.org/10.4324/9781003195641>.

- Dostal, Jörg Michael. 2015. "Syria and the Great Powers (1946-1958): How Western Power Politics Pushed the Country Toward the Soviet Union." *Syria Studies* 7 (4): 1–76. <https://research-repository.st-andrews.ac.uk/handle/10023/10346>.
- Erkan, Mariya. 2023. "Russian Foreign Policy in the Middle East in the Putin Era: Seeking Hegemony." Sakarya University.
- Even, Yair. 2016. "Two Squadrons and Their Pilots: The First Syrian Request for the Deployment of Soviet Military Forces on Its Territory, 1956." 77. Pennsylvania.
- Ghafur, M F. 2017. "Pergulatan Antara Islam Dan Otoritarianisme Di Suriah: Sebuah Pembelajaran." *Tashwirul Afkar*, no. 36. <https://tashwirulafkar.or.id/index.php/afkar/article/view/289%0Ahttps://tashwirulafkar.or.id/index.php/afkar/article/download/289/212>.
- Gills, Barry. 1993. "The Hegemonic Transition in East Asia: A Historical Perspective." In *Gramsci, Historical Materialism and International Relations*, edited by Stephen Gill, 185–212. New York: Cambridge University Press.
- Ginat, Rami. 2000. "The Soviet Union and the Syrian Ba'th Regime: From Hesitation to Rapprochement." *Middle Eastern Studies* 36 (2): 150–71. <https://doi.org/10.1080/00263200008701312>.
- Ginor, Isabella. 2003. "The Cold War's Longest Cover-Up: How and Why the USSR Instigated the 1967 War." *Middle East Review of International Affairs* 7 (3): 27–52. <https://doi.org/10.4324/9781315234304-2>.
- Giustozzi, Antonio. 2025. "Russia and the Collapse of the Assad Regime." 8. *Academic Policy Paper Series*. Academic Policy Paper Series. Washington.
- Gowayed, Heba, Imad K. Harb, Bahraa Hijazi, Khalil E. Jahshan, Patricia Karam, and Annelle Sheline. 2024. "Implications of Assad's Fall for Syria and the Region." Arab Center. December 10, 2024. <https://arabcenterdc.org/resource/implications-of-assads-fall-for-syria-and-the-region/>.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Prison Notebooks of Antonio Gramsci. Telos*. London: Lawrence & Wishart.
- Hassan, L. M. 2023. "Global and Local Challenges Facing Syria and Russia in the Light of the Resolution of the Syrian Crisis." *Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta Vostokovedenie i Afrikanistika* 15 (4): 790–99. <https://doi.org/10.21638/spbu13.2023.413>.
- Hoare, Quintin, and Geoffrey Nowell Smith. 1971. *Selection from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. Edited by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York: Lawreace & Wishart.
- Humud, Carla E. 2022. "Syria And US Policy – Analysis." Eurasia Review. May 4, 2022. https://www.eurasiareview.com/04052022-syria-and-us-policy-analysis/?utm_source=chatgpt.com.
- Kabalan, Marwan. 2024. "Al-Assad's Fall Is Iran and Russia's Loss, but Are There Winners?" Al Jazeera. December 10, 2024. <https://www.aljazeera.com/news/2024/12/10/analysis-al-assads-downfall-has-upended-the-regional-balance-of-power>.
- Kreutz, Andrej. 2007. *Russia in the Middle East, Friend of Foe?* Connecticut: Praeger Security International. [https://doi.org/10.1016/S0969-4765\(03\)10016-1](https://doi.org/10.1016/S0969-4765(03)10016-1).
- Krókowska, Katarzyna. 2011. "The Fall of Democracy in Syria." *Perceptions* 16 (2): 81–98.

- <http://libproxy.lib.unc.edu/login?url=https://search.proquest.com/docview/920195464?accountid=14244%0Ahttp://vb3lk7eb4t.search.serialssolutions.com/?genre=article&atitle=The+Fall+of+Democracy+in+Syria&author=Króowska%2C+Katarzyna&volume=16&issue=2&spage=>.
- Lund, Aron. 2019. "From Cold War to Civil War: 75 Years of Russian-Syrian Relations." 7/2019. *Swedish Institute of International Affairs (UI)*. Sweden. <https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2019/ui-paper-no.-7-2019.pdf>.
- Mudore, Syarif Bahaudin, and Nurlaila Safitri. 2019. "Dinamika Perang Suriah: Aktor Dan Kepentingan." *Politea: Jurnal Politik Islam: Jurnal Politik Islam* 2 (2): 67–92. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1437>.
- National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces. 2023. "SOC's President Receives US State Department START Officials in Istanbul." National Coalition of Syrian Revolution and Opposition Forces. November 13, 2023. https://en.etalaf.org/all-news/news/socs-president-receives-us-state-department-start-officials-in-istanbul?utm_source=chatgpt.com.
- Oligie, Clement Ndidi. 2019. "Why Russia Is Involved in the Syrian Civil War: One Issue, Many Views." *Relationes Internationales* 12 (1): 93–136. <https://core.ac.uk/outputs/268089795>.
- Outzen, Rich. 2025. "Assad's Fall Has Created an Opportunity for US-Turkey Cooperation." *Atlantic Council*. January 6, 2025. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/turkeysource/assads-fall-has-created-an-opportunity-for-us-turkey-cooperation/>.
- Phillips, Christopher. 2022. "The International System and the Syrian Civil War." *International Relations* 36 (3): 358–81. <https://doi.org/10.1177/00471178221097908>.
- Phoenna, Riezky Poetra, Chandra Purnama, and Windy Dermawan. 2023. "Kebijakan Militer Rusia Terhadap Suriah Dalam Mendukung Rezim Bashar Al-Assad (2015-2020)." *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 2 (1): 1–14. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v2i1.45348>.
- Reich, Bernard, and Stephen H. Gotowicki. 1994. "The United States and the Soviet Union in the Middle East." In *The Decline of The Soviet Union and The Transformation of The Middle East*, edited by David H. Goldberg and Paul Marantz, 212–28. London & New York: Westview Press. <https://doi.org/10.2307/1173976>.
- Şen, Ayça Hüma. 2020. "Russion-Syrian Relations Since the Arab Spring: A Strong Alliance." Middle East Technical University.
- Shad, Tahir I, Tahir L Shad, Steven Boucher, and Jennifer Gray Reddish. 1995. "Syrian Foreign Policy in the Post Soviet Era." *Arab Studies Quarterly* 17 (1): 77–94.
- Smagin, Nikita. 2023. "Forgotten Front: Why Syria Is Becoming a Headache for Russia." Carnegie Endowment for International Peace. October 17, 2023. https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/politika/2023/10/forgotten-front-why-syria-is-becoming-a-headache-for-russia?lang=en&utm_source=chatgpt.com.
- Smith, Nicholas. 2019. "Using Process-Tracing to Drive Foreign Policy Analysis: Strengths and Weaknesses in the Context of Analyzing the Foreign Policies of the EU and Russia in the Context of the Ukraine Crisis." *Sage Research Methods Cases*, no. May. <https://doi.org/10.4135/9781526462404>.

- Stahl, Rune Møller. 2019. "Ruling the Interregnum: Politics and Ideology in Nonhegemonic Times." *Politics and Society* 47 (3): 333–60. <https://doi.org/10.1177/0032329219851896>.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2023. "Antonio Gramsci." Stanford Encyclopedia of Philosophy. January 13, 2023. https://plato.sydney.edu.au/entries/gramsci/?utm_source=chatgpt.com.
- Tempo. 2024. "Nasib Suriah: Jatuh Bangun Bashar Al Assad Yang Digulingkan Oposisi Suriah." Tempo. December 10, 2024. <https://www.tempo.co/internasional/nasib-suriah-jatuh-bangun-bashar-al-assad-yang-digulingkan-oposisi-suriah-1179564>.
- The Economist. 2025. "Syria's Economy, Still Strangled by Sanctions, Is on Its Knees." The Economist. March 6, 2025. <https://www.economist.com/briefing/2025/03/06/syrias-economy-still-strangled-by-sanctions-is-on-its-knees>.
- Torrey, Gordon H. 1969. "The Ba'th: Ideology and Practice." *The Middle East Journal* 23 (4): 445–70.
- Trudolyubov, Maxim, and Dan White. 2024. "With Syria's Collapse Russia's Regional Power Play Disintegrates." Wilson Center. December 9, 2024. <https://www.wilsoncenter.org/blog-post/syrias-collapse-russias-regional-power-play-disintegrates>.
- Trujillo, Raquel Jorge. 2025. "Russia's Foreign and Security Policy in Syria: Historical Relations, Cold War Paradigms, and Contemporary Geopolitics." *Frontiers in Political Science* 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1489285>.
- Yassin, Ammar. 2024. "The Russian Cultural Footprint in Syria." Future for Advanced Research & Studies. September 16, 2024. https://futureuae.com/en/Mainpage/Item/9688/the-soft-power-the-russian-cultural-footprint-in-syria?utm_source=chatgpt.com.
- Yonker, Carl, and Christopher Solomon. 2021. "The Banality of Authoritarian Control: Syria's Ba'ath Party Marches On." Carnegie Endowment for International Peace. February 19, 2021. <https://carnegieendowment.org/sada/2021/02/the-banality-of-authoritarian-control-syrias-baath-party-marches-on?lang=en>.